

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perekonomian suatu negara yang mengalami perkembangan dan mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi (Novianingsih, 2011). Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan negara untuk menghasilkan jumlah dan kualitas barang dan jasa akan selalu mengalami penambahan (Sukirno, 2004).

Untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang. Alat ukur keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi merupakan: pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran rendah, dan neraca pembayaran yang sehat (Majid, 2007).

Kebijakan pemerintah dibidang moneter dan fiskal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan dengan cara mengatur jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, pendapatan, dan pengeluaran pemerintah yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika perekonomian dari tahun ke tahun untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Pada saat ekonomi berjalan dengan lambat dari yang seharusnya ditandai dengan rendahnya pertumbuhan dan tingginya pengangguran, dengan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi dan mengurangi pengangguran. Sedangkan pada saat perekonomian berjalan terlalu cepat ditandai dengan pertumbuhan dan inflasi yang tinggi, maka kebijakan moneter dan fiskal diharapkan dapat menekan dan mengarahkan perekonomian negara (Majid, 2007).

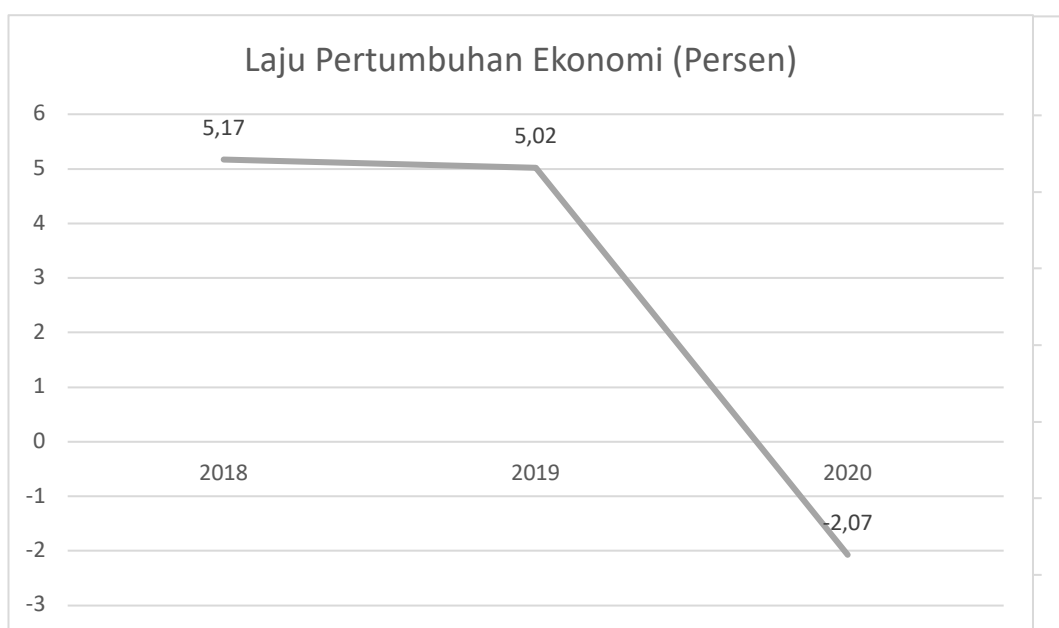
Pertumbuhan dan stabilitas sektor riil dipengaruhi melalui kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah, di Indonesia kebijakan fiskal ini berada dibawah kewenangan Kementerian Keuangan. Sedangkan dalam sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah melalui kebijakan moneter yang berada dibawah kewenangan Bank Indonesia. Tujuan dan implikasi dari dua kebijakan tersebut dapat bertolakbelakang dan bahkan saling melemahkan. Perbedaan tujuan tersebut mengakibatkan hasil dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak optimal atau bahkan saling meniadakan. Koordinasi moneter dan fiskal yang baik bukan merupakan suatu pilihan alternatif kebijakan tetapi sudah menjadi keharusan (Goeltom, 2012).

Kebijakan moneter dan fiskal dapat diatur dan dikoordinasikan sedemikian rupa agar stimulus yang dihasilkan oleh kedua kebijakan ini dapat diarahkan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, agar tidak saling meniadakan atau menimbulkan pengaruh yang berlebihan, sehingga dapat mencapai stabilitas harga dan neraca pembayaran yang sehat secara bersama-sama (Goeltom, 2012).

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan tingkat pengangguran, dan neraca pembayaran yang seimbang diharapkan dapat terwujud dengan adanya kebijakan moneter dan fiskal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan produksi barang modal dan penambahan sektor jasa (Soleh, 2016).

Berikut merupakan grafik laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2020:



Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

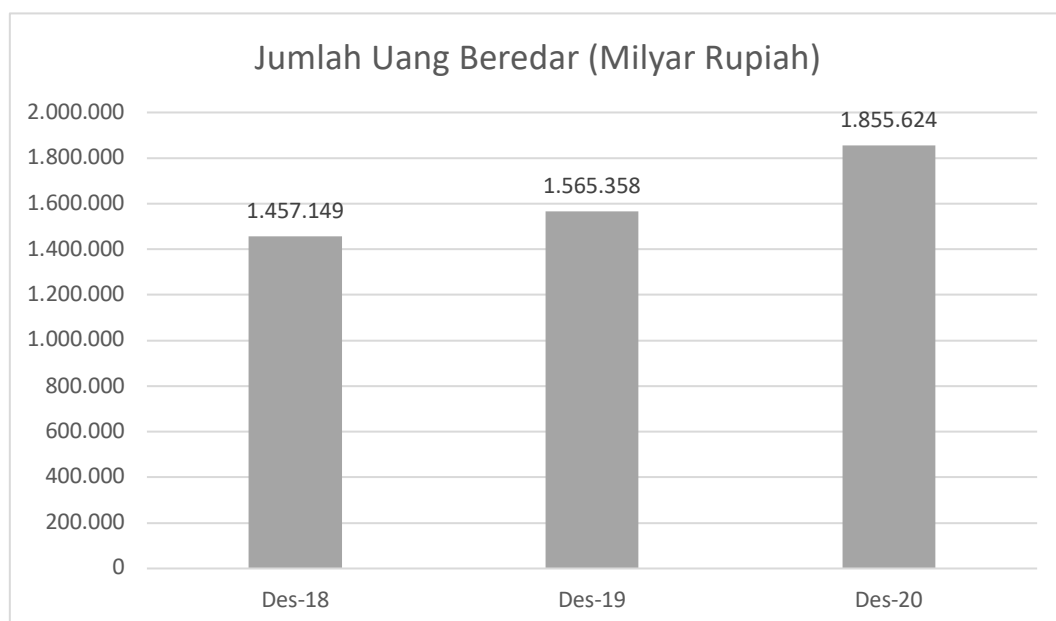
Diketahui bahwa kenaikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen ditahun 2018. Pada tahun 2019 sebesar 5,02 persen. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -2,07 persen.

Masa-masa pandemi membuat ekonomi mengalami berbagai tekanan, banyak sektor ekonomi yang mengalami penurunan secara tajam. Hanya sektor kesehatan & kegiatan sosial dan sektor informasi & komunikasi selama masa pandemi ini

yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami penurunan yang paling tajam, disusul oleh sektor akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pengadaan gas & listrik, perdagangan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, dan jasa lainnya.

Bank Sentral AS menambah atau mengurangi jumlah dolar AS yang beredar melalui operasi pasar terbuka untuk mengontrol jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar tidak hanya tergantung pada kebijakan bank sentral, tetapi juga pada pelaku rumah tangga (pemegang uang) dan bank (tempat penyimpanan uang).

Berikut merupakan grafik jumlah uang beredar tahun 2018-2020:



Gambar 1.2 Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

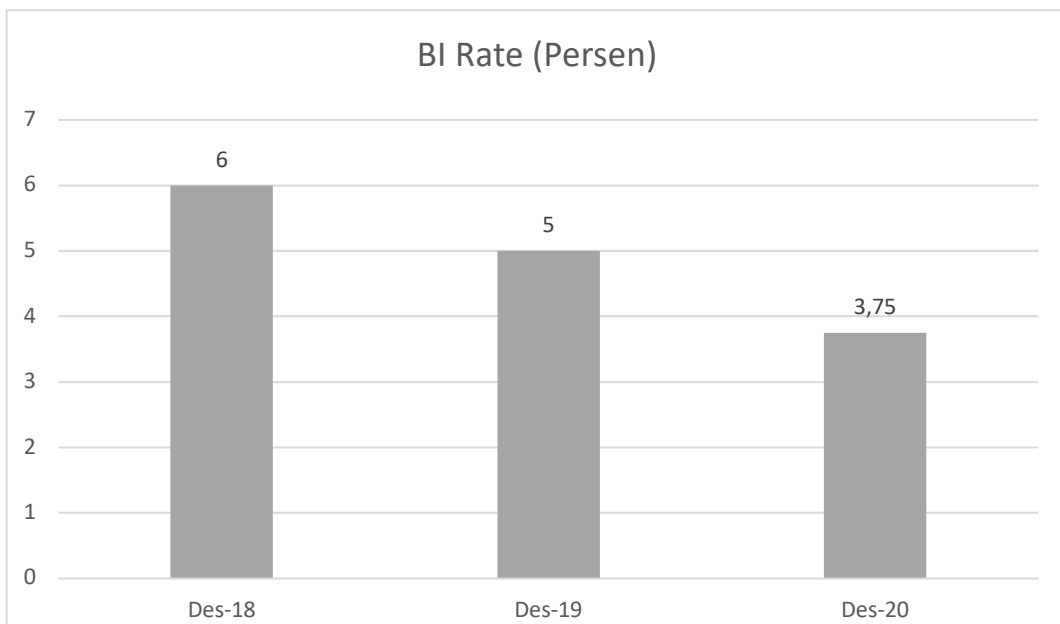
Dari Gambar 1.2 dapat kita ketahui bahwa jumlah uang beredar di Indonesia mengalami kenaikan tahun ke tahun. Di tahun 2018, jumlah uang beredar yaitu

1.457.149 milyar. Pada tahun 2019 jumlah uang beredar yaitu 1.565.358 milyar. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi, yaitu 1.855.624 milyar.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah uang beredar mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahun, terutama di tahun 2020. Kenaikan ini akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia apabila peningkatan jumlah uang beredar lebih cepat daripada pertumbuhan output riil.

Penurunan suku bunga diharapkan menjadi stimulus terhadap kelesuan perekonomian di Indonesia. Hal ini dilandasi bahwa hubungan suku bunga dan investasi adalah negatif, dalam artian penurunan suku bunga akan diiringi dengan kenaikan investasi, demikian pula sebaliknya.

Berikut merupakan grafik BI Rate tahun 2018-2020:



Gambar 1.3 BI Rate di Indonesia Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

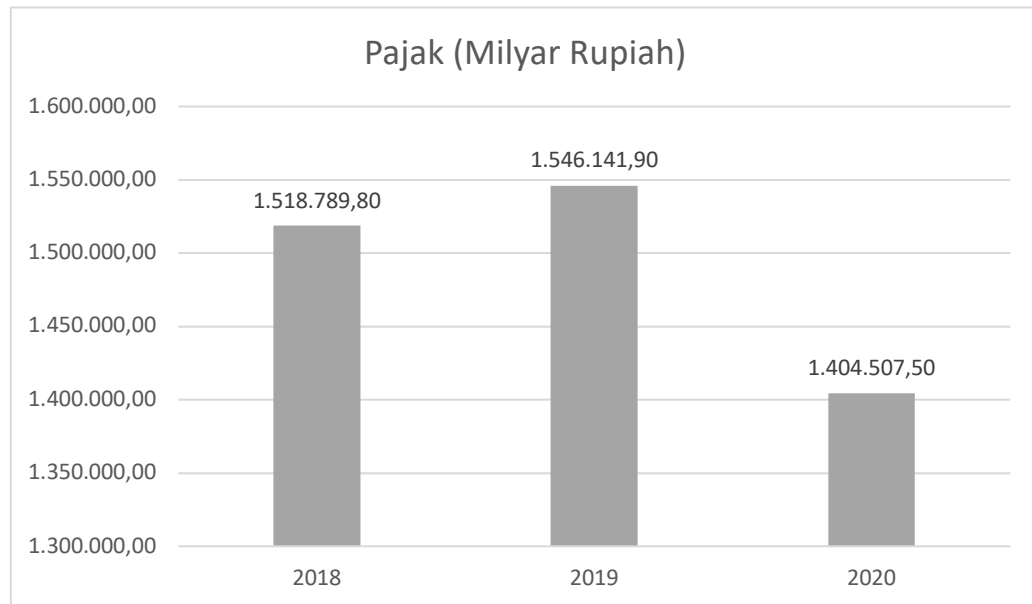
Dari Gambar 1.3 dapat kita ketahui bahwa tingkat BI Rate di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2018, tingkat BI Rate sebesar 6 persen. Pada tahun 2019 tingkat BI Rate sebesar 5 persen. Kemudian pada tahun 2020 tingkat BI Rate sebesar 3,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat BI Rate mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2020.

Dalam rangka menjaga, dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi tetap baik, perlu adanya peran serta pemerintah daerah dalam menjaga iklim investasi melalui kebijakan fiskal agar kebijakan tersebut merespon dari adanya kebijakan moneter yang ada (Nangarumba, 2016).

Sebagian besar pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari departemen pajak. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia (Saragih, 2018).

Penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 ini dikarenakan lesunya kegiatan perekonomian Indonesia dan transaksi perdagangan internasional yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Penerimaan jenis pajak seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22 (Impor), PPh pasal 25 dan 29, dan PPN dalam negeri terpengaruh oleh pemberian fasilitas perpajakan untuk memulihkan perekonomian nasional.

Berikut merupakan grafik penerimaan perpajakan tahun 2018-2020:



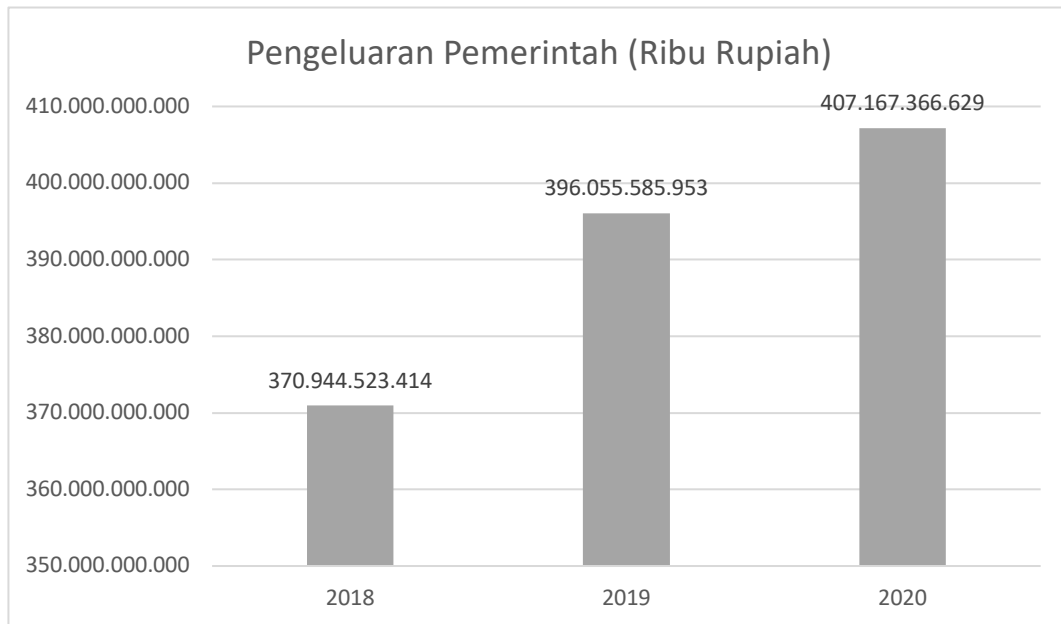
Gambar 1.4 Penerimaan Perpajakan di Indonesia Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Gambar 1.4 dapat kita ketahui bahwa penerimaan perpajakan di Indonesia pada tahun 2018 sejumlah 1.518.789,80 milyar rupiah. Pada tahun 2019 sejumlah 1.546.141,90 milyar rupiah, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 sejumlah 1.404.507,50 milyar rupiah, mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya.

Pengeluaran pemerintah diperuntukkan bagi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat yang akan mendorong meningkatnya pendapatan perkapita yang semakin besar dari tahun ketahun. Pada gilirannya, peningkatan PDB secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak (Sari, Syechalad, & Majid, 2016).

Berikut merupakan grafik pengeluaran pemerintah Indonesia tahun 2018-2020:



.Gambar 1.5 Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Gambar 1.5 dapat kita ketahui bahwa pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sejumlah 370.944.523.414 ribu rupiah. Pada tahun 2019 sejumlah 396.055.585.953 ribu rupiah. Kemudian pada tahun 2020 sejumlah 407.167.366.629 ribu rupiah.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2018 – 2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020. Untuk mengatasi penurunan laju pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, pajak dan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2020

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Pajak, dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2020?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Pajak, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis.

1. Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Pajak, dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2020?
2. Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Pajak, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2020?

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak. Adapaun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu, untuk memberikan kontribusi ilmiah tentang pentingnya pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sebagai salah satu bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi operasional kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan yang efektif dan efisien khususnya dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teoritis maupun empiris serta menjadikan penelitian ini peluang mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari dalam perkuliahan dengan suatu masalah sedang terjadi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Indonesia dengan pengambilan data pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan data-data yang valid dan terbaru mengenai perekonomian di Indonesia.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diawali sejak bulan Juni 2021, diawali dengan pengajuan judul kepada pihak jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat didalam tabel.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

Keterangan	Tahun 2022																			
	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																			
Pengumpul an Data		■	■																	
Penyusunan UP dan Bimbingan Penelitian				■	■	■	■													
Seminar Usulan Penelitian								■												
Pengolahan Data									■	■										
Penyusunan Skripsi dan Bimbingan											■	■	■	■						
Ujian Skripsi dan Komperhen sif															■					